

LAPORAN SEMESTER I APBN 2020



Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2020 menghadapi kondisi luar biasa



Pandemi Covid-19 berkembang dari masalah kesehatan, menjadi masalah sosial, ekonomi, dan keuangan di seluruh dunia



Arah perekonomian dunia berubah drastis hingga mengarah pada kondisi resesi dengan ketidakpastian yang tinggi.



Respon cepat dan luar biasa dibutuhkan dalam menghadapi pandemi Covid-19



Pemerintah perlu menetapkan payung hukum sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk melakukan *extraordinary actions* dalam penanganan dampak Covid-19. Perppu 1/2020 (UU No.2/2020) lahir sebagai payung hukum pelaksanaan hal tersebut.



Perlambatan ekonomi dan kebutuhan penanganan dampak Covid-19 serta pemulihan ekonomi membawa konsekuensi perubahan signifikan terhadap APBN



Perubahan postur APBN tahun 2020 melalui Perpres 54/2020, yang kemudian diubah lagi dengan Perpres 72/2020 dilakukan sebagai bentuk kebijakan *countercyclical* untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

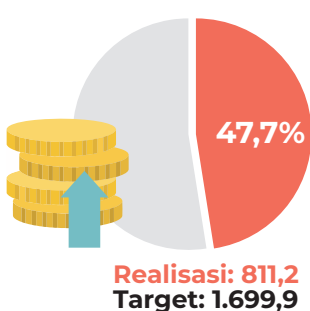
Mengalami Penyesuaian Sejalan dengan Eskalasi Pandemi Covid-19

	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi (%)	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%)	Harga Minyak (US\$/barrel)	Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	Lifting Gas (ribu barrel/hari)
Realisasi Semester I 2019	5,06	3,28	14.197	5,8	63	748	1.047
Realisasi Semester I 2020	(1,1) - (0,4)*	1,96	14.600	3,25	39,8	702**	987**

* angka proyeksi
** realisasi s.d Mei

Pendapatan Negara

(triliun Rupiah)



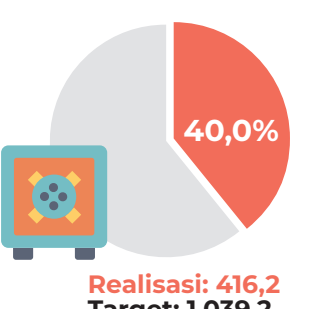
- Perpajakan dan PNBPN sebagai bagian instrumen kebijakan penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui pemberian insentif, antara lain berupa fasilitas pajak dan kepabeanan atas barang dan jasa yang digunakan untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19, insentif perpajakan untuk dunia usaha termasuk UMKM seperti penurunan tarif PPh Badan dan pengurangan angsuran, serta insentif PNBPN dalam bentuk penundaan pembayaran PNBPN dan pengenaan tarif s.d nol rupiah
- Pendapatan Negara tahun 2020 mengalami revisi target sebagai dampak perlambatan ekonomi yang ikut memengaruhi asumsi makro serta pemberian insentif dalam rangka penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi
- Dampak pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan insentif perpajakan terefleksi pada realisasi Penerimaan Pajak semester I yang tumbuh negatif 12%, sedangkan untuk Kepabeanan dan Cukai masih dapat tumbuh positif sebesar 8,8% namun melambat. Sementara, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami pertumbuhan sebesar negatif 11,8% pada semester I tahun 2020 terutama sejalan dengan penurunan harga komoditas dan *lifting* migas

Belanja Negara



- Belanja Negara tahun 2020 dilakukan dengan penyesuaian pagu untuk mendukung belanja penanganan dampak Covid-19 baik di sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi sebagai bentuk kebijakan *countercyclical*
- Dilakukan kebijakan *refocusing* dan realokasi dengan cara peningkatan efisiensi, tetap sejalan dengan kebijakan pembatasan sosial dan dialihkan untuk penanganan dampak Covid-19
- Kinerja sampai dengan semester I dipengaruhi oleh pembatasan sosial, *refocusing*/realokasi, serta mulai dilaksanakan kegiatan penanganan dampak Covid-19 (penyaluran berbagai jenis bansos, penanganan kesehatan, pra kerja, dan program padat karya). Hal ini terlihat antara lain dengan meningkatnya belanja bansos sebesar 41,0%. Kinerja TKDD terutama dipengaruhi oleh realisasi penyaluran DAK Fisik dan perbaikan kinerja Pemda dalam memenuhi persyaratan penyaluran

Pembiayaan Anggaran



- Pembiayaan Utang dilaksanakan secara *prudent* untuk mendukung penanganan dampak Covid-19. Hampir semua negara memberikan stimulus dengan skema *extraordinary* dan dengan ukuran yang luar biasa. Stimulus APBN berdampak pada penambahan defisit menjadi 6,34% dari PDB.
- Pembiayaan anggaran merespon pelebaran defisit yang menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan *countercyclical* melalui:
 - Penerbitan *sovereign bond*
 - Percepatan penyiapan aturan terkait pembiayaan investasi
 - Persiapan pengadaan *upsized* pinjaman tunai bersumber dari *development partners*

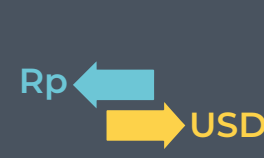
Outlook APBN 2020



Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan akan berada pada rentang negatif 0,4 sampai dengan 1,0 persen. Dengan dukungan sinergi kebijakan fiskal dan moneter sebagaimana amanat UU Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah berharap bahwa pertumbuhan ekonomi akan berada pada zona positif.

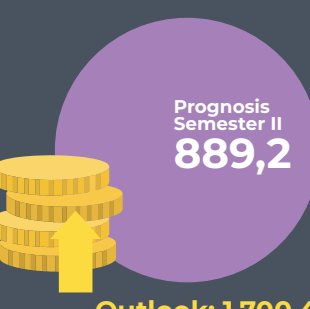


Kekuatan daya beli yang belum sepenuhnya pulih serta sikap berhati-hati dalam konsumsi, membuat inflasi diperkirakan masih dalam rentang yang terjaga dan cenderung stabil.



Nilai tukar rupiah diperkirakan dalam tren menguat sejalan dengan stabilitas ekonomi makro dan arus modal masuk ke dalam negeri namun tetap diwaspadai risiko volatilitas pasar keuangan global.

(triliun Rupiah)



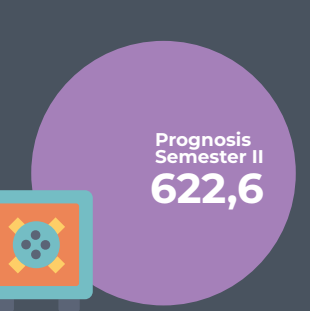
Pendapatan Negara

- Pendapatan Negara semester II akan sejalan dengan aktivitas ekonomi di era normal baru dan pemanfaatan insentif fiskal. Upaya perluasan basis pajak akan diupayakan melalui implementasi pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
- Penerimaan Kepabeanan dan Cukai masih akan dipengaruhi kondisi perekonomian serta pemanfaatan insentif kepabeanan oleh dunia usaha.
- Sementara itu sektor PNBPN akan sejalan dengan pergerakan harga komoditas utama khususnya migas dan batubara serta akan mengoptimalkan layanan PNBPN K/L kepada masyarakat



Belanja Negara

- Dalam semester II, akan diarahkan untuk pelaksanaan dan penyelesaian berbagai kegiatan penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (kesehatan, dukungan UMKM, lanjutan kartu pra kerja, dan program PEN melalui TKDD seperti DID, DAK Fisik, dan Dana Desa).
- Belanja Negara masih dipengaruhi lanjutan kebijakan pembatasan dan perubahan mekanisme kerja, sesuai dengan pelaksanaan *refocusing*/realokasi. Sementara itu, langkah-langkah monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program/kegiatan akan terus diperkuat.



Pembiayaan Anggaran

- Outlook Pembiayaan Anggaran diperkirakan meningkat sejalan dengan pelebaran defisit untuk pemenuhan pendanaan penanganan dampak Covid-19 dan program PEN. Pembiayaan terutama dalam bentuk Pembiayaan Utang dan Pembiayaan Investasi yang diperkirakan meningkat seiring berjalannya program PEN.
- Outlook pembiayaan diharapkan dapat sesuai target kebutuhan defisit anggaran dan program pemulihan ekonomi nasional dapat terealisasi seluruhnya, melalui langkah kebijakan:
 - Optimalisasi sumber pembiayaan yang efisien
 - Penyelesaian aturan dan percepatan pelaksanaan dengan memperhatikan tata kelola
 - Pemanfaatan realisasi SAL sebagai bagian dari *fiscal buffer*